



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : KEPANITERAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAIFUL ANWAR
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI TINGKAT I
3. NHK : 135026

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 230.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO E1F02N12M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO AT11T21801/AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, SUZUKI XL 7 MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 7.200.000

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 45.500.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.882.700.000



III. HUTANG

Rp. 1.040.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.842.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.